

Isu Rasisme dalam Masyarakat Amerika yang Multikultural

✓✓
Pryadi Satriana

Multiculturalism in the United States derived from the concept of cultural pluralism. It constitutes as an opportunity to fight against injustice towards minorities. It is not easy to create a multicultural society as ethnicity relates to primordialism. Interactions among racial groups construct images that may lead to racial prejudices. The American government has the responsibility of building a sense of trust among its citizens so that institutions can act as effective agents of change in fostering a thriving multicultural society.

Di Amerika Serikat, multikulturalisme dikembangkan dari konsep pluralisme budaya (*cultural pluralism*) yang menekankan kesederajatan kebudayaan dan menjadi acuan untuk memperjuangkan kesamaan hak dari berbagai golongan minoritas, baik secara hukum maupun secara sosial (Suparlan 2004: 117-123). Multikulturalisme merupakan dampak dari keberhasilan *Civil Rights Movement* pada dasawarsa 1960-an yang ditandai dengan dikeluarkannya beberapa *Civil Rights Acts*. Pada tahun 1964 dikeluarkan *Civil Rights Act* yang melarang diskriminasi berkenaan dengan fasilitas-fasilitas umum (*public accommodation*) dan rekrutmen pekerja (*employment*), dan pada tahun 1965 dikeluarkan *Voting Rights Act* yang membuat kaum kulit hitam mempunyai hak untuk memberikan suara dalam pemilu, sedangkan pada tahun 1968 dikeluarkan *Civil Rights Act* yang melarang diskriminasi berkenaan dengan penjualan atau penyewaan rumah (Welch et al. 1990: 531-533).

Namun hal-hal di atas tidaklah meniadakan terjadinya ketegangan-ketegangan rasial (*racial tensions*) di Amerika Serikat. Setelah sekitar tiga puluh tahunan *Civil Rights Acts* di atas dikeluarkan, Giddens (1997: 225) mencatat bahwa ketegangan rasial di AS meningkat. Ketegangan tersebut mencapai titik yang tinggi di kota-kota seperti New York, Boston, dan Chicago. Hal itu ditunjukkan dengan terjadinya demonstrasi publik secara besar-besaran, baik oleh golongan kulit putih maupun golongan kulit hitam, yang pada intinya masing-masing pihak menuduh pihak lain bersikap rasis! Giddens juga mencatat bahwa pada tahun 1992 terjadi kerusuhan rasial yang besar di Los Angeles dan kota-kota lainnya di AS. Kerusuhan serupa terjadi lagi di Los Angeles pada pertengahan dasawarsa 1990-an.

Berdasarkan data-data di atas, dapat diajukan permasalahan-permasalahan berikut. Pertama, apakah rasisme masih terjadi pada masyarakat Amerika yang *de jure* adalah masyarakat multikultural. Kedua, bagaimana jawaban atas permasalahan pertama itu dapat dijelaskan. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.

Massey (1993) menunjukkan bahwa hampir sepertiga orang Afro-Amerika tinggal di area dimana mereka tidak mengalami kontak dengan orang kulit putih. Faktor-faktor ekonomi telah membuat mereka terpisahkan (*segregated*) dari orang-

orang kulit putih. Segregasi ini merupakan suatu bentuk diskriminasi dan merupakan perwujudan dari sikap rasis. Terkait dengan hal di atas, Oliver dan Shapiro (1997) mengemukakan bahwa rasisme telah menciptakan kemiskinan dan menimbulkan masalah-masalah sosial, menjadikan orang-orang kulit hitam *underclass* atau masyarakat kelas bawah (dalam Griffiths & Hope 2000: 130). Mengemukakan hal yang senada, Charon (1998: 223) menyebutkan bahwa segregasi struktural yang terjadi di AS telah membuat terjadinya kelompok-kelompok masyarakat. Jadi pada hakekatnya yang ada bukanlah masyarakat Amerika melainkan masyarakat-masyarakat Amerika.

Masyarakat yang menerapkan ras-ras sosial (*social races*), dalam artian membuat perbedaan-perbedaan berdasarkan ras dalam kehidupan sosial masyarakatnya, merupakan ciri khas masyarakat rasis. Ras dan rasisme merupakan hal-hal yang tak terpisahkan (Cashmore 1996, dalam Griffiths & Hope 2000:117). Menurut kategori ini, masyarakat Amerika tergolong sebagai masyarakat yang rasis. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa dalam sensus di Amerika Serikat, populasi penduduk diklasifikasikan berdasarkan ras dan kesukubangsaan (Banton 1983, dalam Mann 1983: 319). Mendukung pendapat bahwa masyarakat Amerika merupakan masyarakat rasis, Waters (1990: 166-167) mengatakan bahwa diskriminasi rasial sekarang ini masih merupakan fakta yang tak terelakkan dalam kehidupan (*is still inescapable fact of life*) bagi orang-orang yang bukan keturunan Eropa (*non-European*) yang tinggal di AS. Kesetaraan dalam keturunan (*equality of heritages*) sekarang ini masih jauh dari kenyataan dalam kehidupan masyarakat Amerika.

Mengapa rasisme masih terjadi di Amerika? Ada dua teori yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, isu rasial adalah isu yang primordial (Suparlan 2004), yang dampaknya semakin kuat setelah dikaitkan dengan isu primordial (utama dan diutamakan) lainnya seperti agama. Pertautan antara dua isu primordial yang keduanya dapat memicu sikap rasis tersebut dapat dijumpai dalam tulisan Giddens (1997: 218), yang menyebutkan bahwa pertentangan (*opposition*) antara 'putih' dan 'hitam' merupakan simbol-simbol budaya (*cultural symbols*) yang berakar kuat dalam kebudayaan orang-orang kulit putih. 'Hitam', baik direpresentasikan lewat 'warna' maupun 'kondisi', dipandang sebagai simbol Iblis yang berinkarnasi (*Devils incarnate*) sejak *sebelum* orang-orang kulit mengadakan kontak sosial secara ekstensif dengan orang-orang kulit hitam. Pandangan ini didukung oleh Adrian Piper (1992: 30-31, dalam Ferrante & Brown 1999) yang mengatakan,

"What joins me to other blacks, then, and other blacks to another, is not a set of shared physical characteristics, for there is none that all blacks share. Rather, it is the shared experience of being visually or cognitively *identified* as black by a white racist society, and the punitive and damaging effects of that identification."

Dari kutipan di atas jelaslah bahwa yang dijadikan dasar dari diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam, menurut Piper, adalah 'kondisi hitam' (*blackness*) itu sendiri.

Teori kedua yang menjelaskan terjadinya rasisme di Amerika adalah teori *racial formation*. Dalam buku *Racial Formation in the United States: From 1960s to the 1990s*, Omi dan Winant (1994: 82) mengemukakan bahwa pemerintah federal sendirilah yang membentuk masyarakat AS menjadi masyarakat yang rasis. Menurut teori mereka, intervensi pemerintah federal terhadap *civil rights movement* pada dasawarsa 1960-an, yang menghasilkan *Civil Rights Act* dan kebijakan *affirmative action*, adalah intervensi dari luar (*outside*), dimana pemerintah mengadakan intervensi (*intervening*) tetapi tidak terintervensi (*intervened*). Maksudnya ialah bahwa pemerintah tidak melakukan perubahan di *dalam* dan melalui perubahan tersebut mengadakan perubahan terhadap masyarakat. Contohnya ialah bahwa isu-isu rasial tetap tercantum dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah. Karena itulah mereka berpendapat bahwa pemerintah bersikap rasis dan mendorong terbentuknya masyarakat yang rasis.

Apa yang terjadi di masyarakat, baik disadari atau pun tidak, mendukung teori *racial formation* tersebut. Di masyarakat *terbentuk* rasa permusuhan yang didasari oleh perbedaan ras dan menimbulkan golongan-golongan yang saling bertentangan. Golongan kulit hitam tetap *merasa* didiskriminasi secara individual, institusional, dan struktural (Pincus 1995: 124). Mendukung pendapat ini, Zinn (dalam Pincus dan Ehrlich 1999: 389) mengemukakan,

"The experience of black people in America (also Indians, women, Hispanics, and the poor) instructs us all. No Constitution, no Bill of Rights, no voting procedures, no piece of legislation can assure us of peace or justice or equality. That requires a constant struggle"

Sebaliknya, golongan kulit putih *merasa* bahwa mereka telah menjadi mayoritas yang tertindas (*oppressed majority*) yang menjadi korban diskriminasi pemberian pekerjaan, promosi, pemberian beasiswa, dan penerimaan mahasiswa karena kebijakan *affirmative action* (Ferber 1999, dalam Pincus dan Ehrlich 1999: 346-347). Perlawanan golongan kulit putih direpresentasikan oleh yang dikenal dengan sebutan *The New Right*. Mereka yang tergabung dalam *The New Right* berusaha keras menanggulangi gerakan-gerakan sipil "radikal" yang memperjuangkan *human rights* pada akhir dasawarsa 1960-an, sepanjang dasawarsa 1970-an dan 1980-an. Mereka berusaha mempertahankan dominasi golongan kulit putih melalui "serangkaian polemik ideologis, religius, filosofis, politis, dan yuridis" (Hall 1988 a: 146, dalam Denzin 1992) dengan menciptakan 'kepanikan moral' (*moral panics*) melalui film-film yang dibintangi oleh Chuck Norris, Sylvester Stallone, Clint Eastwood, dan Charles Bronson mulai akhir dasawarsa 1970-an sampai dengan akhir dasawarsa 1980-an. Melalui 'kepanikan moral' tersebut dikonstruksikan bahwa pria bukan kulit putih (*non-white male*) merupakan ancaman terhadap nilai-nilai pokok masyarakat Amerika (Denzin: 140-142). Gerakan ini dapat dipandang sebagai perlawanan (*opposition*) terhadap gerakan *civil rights movement* dan berusaha mencegah meluasnya hak-hak orang kulit hitam, yang sekaligus berarti upaya untuk mempertahankan hegemoni kulit putih dengan segala hak-hak istimewa (*privileges*) mereka. Jadi, pada dasarnya gerakan ini merupakan

suatu bentuk rasisme (Martin 1999: 166).

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa *de facto* masyarakat Amerika masih diwarnai oleh rasisme, walau pun pemerintah AS *de jure* telah berusaha mewujudkan masyarakat multikultural. Membentuk masyarakat yang multikultural tidaklah mudah karena kesukubangsaan merupakan hal yang primordial, seperti halnya dengan agama. 'Hitam' sebagai simbol 'kejahatan' berakar kuat dalam kebudayaan orang-orang kulit putih sebagaimana 'penindasan kulit putih terhadap kulit hitam' tertanam dalam-dalam di benak orang-orang kulit hitam dan diyakini sebagai 'kebenaran'. Hal ini menegaskan pandangan Blumer (dalam Stones 1998: 92) yang mengemukakan bahwa prasangka rasial (*racial prejudice*) adalah suatu proses kolektif, proses sejarah yang panjang di masyarakat yang membentuk gambaran (*images*) tentang kelompok-kelompok rasial. Karena itu, menanggulangi rasisme tidak bisa dilakukan secara *instant*. Untuk mewujudkan perubahan-perubahan yang diinginkan perlu dilakukan rekayasa sosial melalui pendidikan, yaitu pendidikan yang berbasiskan multikulturalisme.

Sebagai katalisator perubahan, pemerintah sebagai pemegang mandat dari rakyat Amerika (yang sekaligus masyarakat di pemerintahan tersebut) harus melakukan *perubahan dari dalam* sehubungan dengan isu-isu rasial. Setelah pemerintah mendapat kepercayaan dari masyarakatnya untuk mewujudkan masyarakat yang multikultural, institusi-institusi yang berperan sebagai agen-agen perubahan akan dapat berfungsi secara efektif.

